

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Agus Zainuddin, *Mengenal Teori Hukum Komprehensif-Integral*, Bandung: Family Copy Center, 2013.
- Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Padang: Akademia, 2013.
- Aminurddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press 1995.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNILA, 1996.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Bambang Priyambodo, *Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: MP. Press, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Casey, Eoghan, *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet, 3rd Edition*, Cambridge: Academic Press, 2011.

- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Forester, Tom and Morrison, Perry , *Computer Ethics: Cautionary Tales and Ethical Dilemmas in Computing*, Boston: MIT Press, 1994.
- Friedman, Lawrence M. *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, 1967.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Marbun, S.F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1977.
- Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta: GP Press Group, 2012.
- Moeljatno, *Azas-Azas hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- M. Khozim (Penerjemah) ; Nurainun Mangunsong (Penyunting), *Sistem hukum : perspektif ilmu sosial / Lawrence M. Friedman ;*, Penerbit Nusa Media, 2018, Bandung, 2018
- Mohammad TahirAzhary, *Negara Hukum, SuatuStudyTentangPrinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Medinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

- Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan; Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- PadmoWahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill Co., 1989.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapikta Selekt Kriminologi*, Bandung: Adi Tama, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Secretary of State for the Home Department, *Cyber Crime Strategy*, London: The Stationery Office Limited, 2010.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sri Rahayu Oktoberina, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan SudartoFakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law*, Bandung: Alumni, 1976.
- Sunaryati Hartono, *Ombudprudensi*, Jakarta: Lembaga Negara Ombudsman, 2010.

Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Presindo, 2007.

Titus, Harold H. et al, *Living Issues In Philosophy*, Alih Bahasa H.M Rasyid, *Persoalan Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Grafindo, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jurnal:

Dewi Bunga, “Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan *Cybercrime*”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.1 - Maret 2019.

Besar, “*Kejahatan dengan menggunakan Sarana Teknologi Informasi*”, <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi> Juni – 2020

Mansyur Kartayasa, “*Restorasi Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*”, 25 April 2012

Website:

FBI, “*FBI’s Cybercrime Report 2017*”, <https://www.cybersecurityintelligence.com/blog/fbis-cybercrimereport-2017-2575.html>, diakses pada 2 Agustus 2019.

<https://tekno.kompas.com/read/2012/05/16/09403718/Indonesia.Masuk.10.Besar.Penyumbang.Cyber.Crime.Terbanyak> - diakses 21 Juni 2020. .

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170731125612-12-231427/yasonna-segera-deportasi-ratusan-wna-china-pelaku-cyber-crime>., diakses pada tanggal 21 Juli 2019.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/105-wn-china-pelaku-cyber-fraud-di-bali-dideportasi.html>., diakses pada tanggal 21 Juli 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170731125612-12-231427/yasonna-segera-deportasi-ratusan-wna-china-pelaku-cyber-crime>., diakses pada tanggal 21 Juli 2019.

Symantec, <http://www.symantec.com/threatreport/>, *Internet Security Threat Report*, Volume 17, Indonesia, Desember 2011

<https://www.merdeka.com/peristiwa/105-wn-china-pelaku-cyber-fraud-di-bali-dideportasi.html>., diakses pada tanggal 21 Juli 2019.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/20/10055211/kejahatan-skimming-atm-dan-keterlibatan-warga-negara-asing>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang Mengatur tentang Informasi Serta Transaksi Elektronik, atau Teknologi Informasi. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 115. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistace in Criminal Matters*)

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana(*Treaty between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Indonesia dan Pemerintahan Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Balik Dalam Masalah Pidana (*Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic Of China Concerning the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)

